






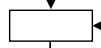
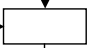
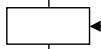
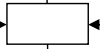
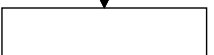
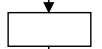
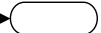


No	Aktivitas	Kepala Dinas	Sekretaris	Tim Perencanaan	Tim Urusan / Sekretariat	DPRD	TAPD	Mutu Baku			Ket
								Persyaratan/ perlengkapan	Durasi	Output	
											
8	Melakukan input data RKA PD ke dalam aplikasi SIPD							Rekapitulasi usulan kegiatan dan anggaran yang telah disetujui	2100 menit	Dokumen RKA	
9	Mencermati dokumen RKA yang telah di input bidang/sekretariat							Dokumen RKA	300 menit	Dokumen RKA	
10	Mencermati dan menyetujui dokumen RKA							Dokumen RKA	300 menit	Dokumen RKA	
11	Menelaah dan memverifikasi dokumen RKA (Desk RKA)							Dokumen RKA	300 menit	Catatan hasil desk, dokumen RKA	
12	Rapat kerja dengan DPRD Provinsi Jawa Barat							Dokumen RKA	180 menit	Dokumen DPA	
13	Penetapan Perda APBD							Dokumen DPA	300 menit	Dokumen DPA, Penetapan Perda APBD	
14	Menerima penetapan Perda APBD							Dokumen DPA, Penetapan Perda APBD	60 menit	Dokumen DPA, Penetapan Perda APBD	
15	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan							Dokumen DPA dan Penetapan Perda APBD	60 menit	Dokumen DPA dan Penetapan Perda APBD	



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 54 /SEKRT/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	
Nama SOP	Penyusunan Peta Proses Bisnis (Probis)

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penjabaran Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat</li><li>2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat</li><li>3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 2310/OT.03/Sekrt tentang Peta Proses Bisnis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami Proses Bisnis Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan</li><li>2. Memahami alur Penyusunan Standar Operasional Prosedur</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Penyusunan RPJMD</li><li>2. SOP Penyusunan Renstra</li></ol>	Komputer/Printer/Scanner, Jaringan Internet, Alat Komunikasi, ATK, Data Logical Framework
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Jika tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada kelancaran penyusunan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Dinas	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali